

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

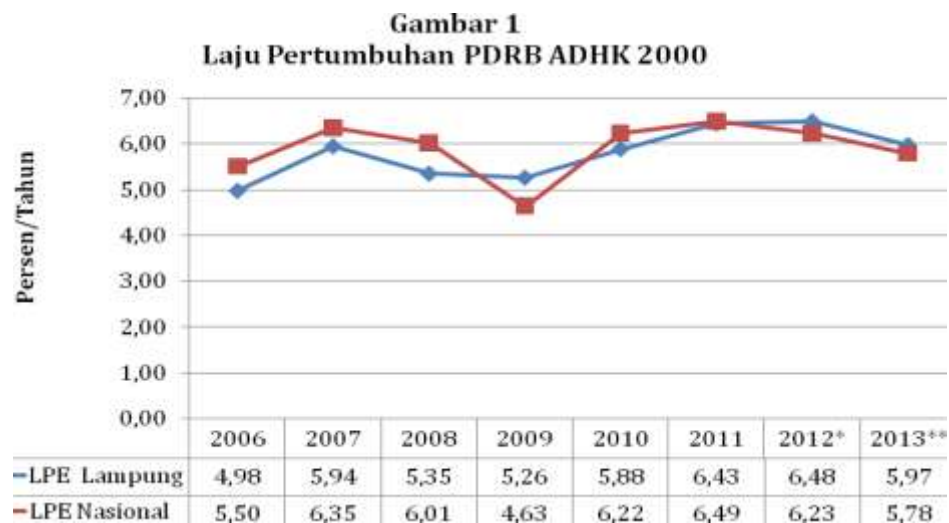
Perkembangan Pembangunan Provinsi Lampung 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

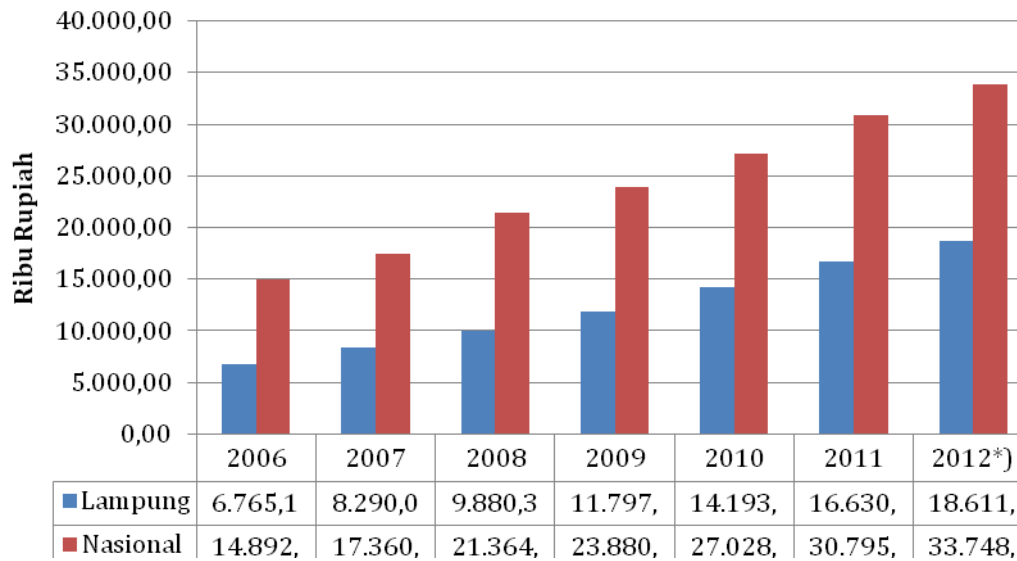
Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang perdagangan di bagian selatan antara wilayah Sumatera dan Jawa. Provinsi Lampung mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta memiliki sentra produksi terbesar nasional untuk komoditas kopi dan udang budidaya serta komoditas utama kelapa sawit, kelapa, dan karet. Perekonomian Provinsi Lampung selama periode 2006–2013 memiliki pola yang mirip dengan kinerja perekonomian nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 5,79 persen per tahun sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDRB 33 provinsi) sebesar 5,90 persen per tahun pada periode yang sama (Gambar 1). Kontribusi PDRB Provinsi Lampung dalam pembentukan output nasional sebesar 2,15 (2012) dan kontribusi PDRB Lampung terhadap output wilayah Sumatera sebesar 9,03 persen.



Sumber: BPS, 2013

Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang hampir sama dengan laju pertumbuhan nasional, Provinsi Lampung belum mampu menutup kesenjangan pendapatan perkapita dari rata-rata pendapatan perkapita nasional. Namun demikian, PDRB perkapita Lampung cenderung meningkat, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2006-2012 juga meningkat. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Lampung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 45,43 persen, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 55,15 persen (Gambar2).

Gambar 2
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

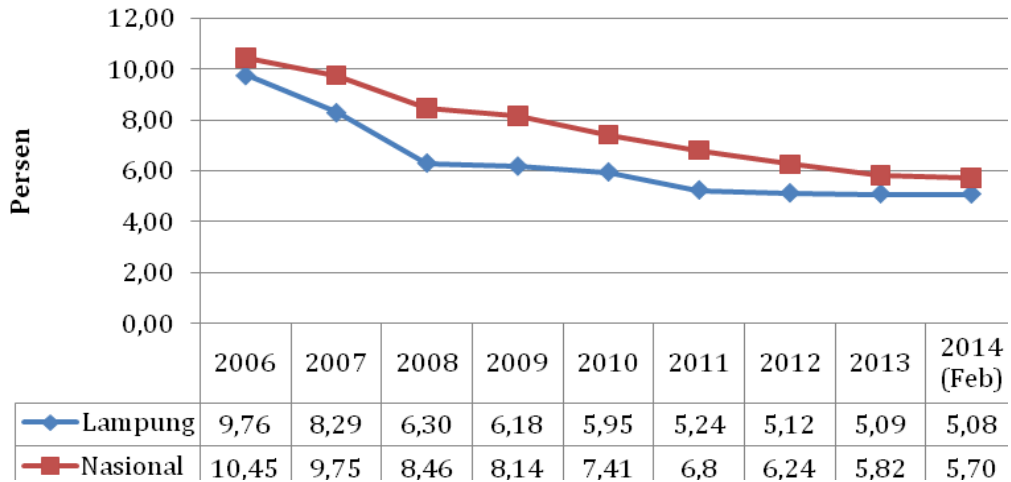


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah Kepulauan Riau cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung selama kurun waktu 2006-2013 berkurang sebesar 4,67 persen (Gambar 3). Pada tahun 2006 tingkat pengangguran daerah sangat tinggi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di Lampung masih sangat sensitif terhadap gejolak harga BBM. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Lampung tergolong rendah. Dengan PDRB per kapita yang relatif rendah, kondisi ini menunjukkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

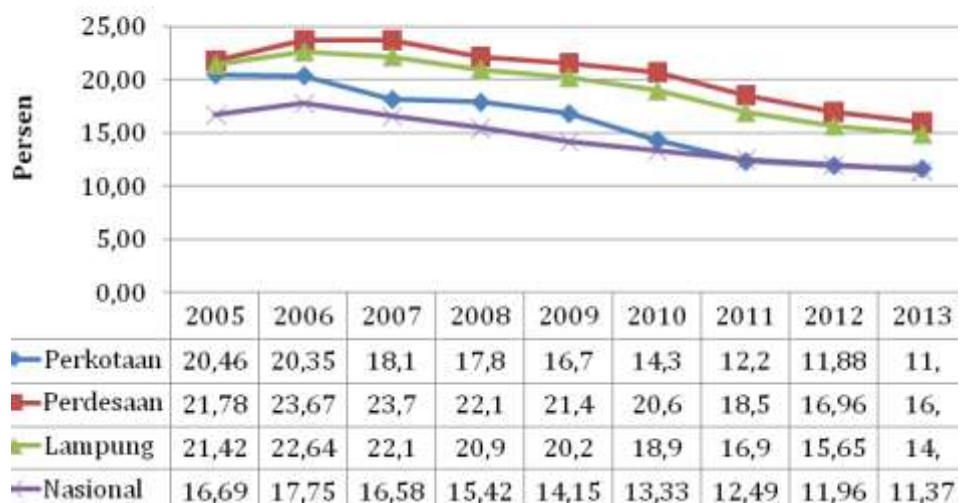


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah juga berhasil ditekan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 22,64 persen menjadi 14,8 persen (Gambar 4). Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Hal ini mengaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan. Secara total, tingkat kemiskinan daerah lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

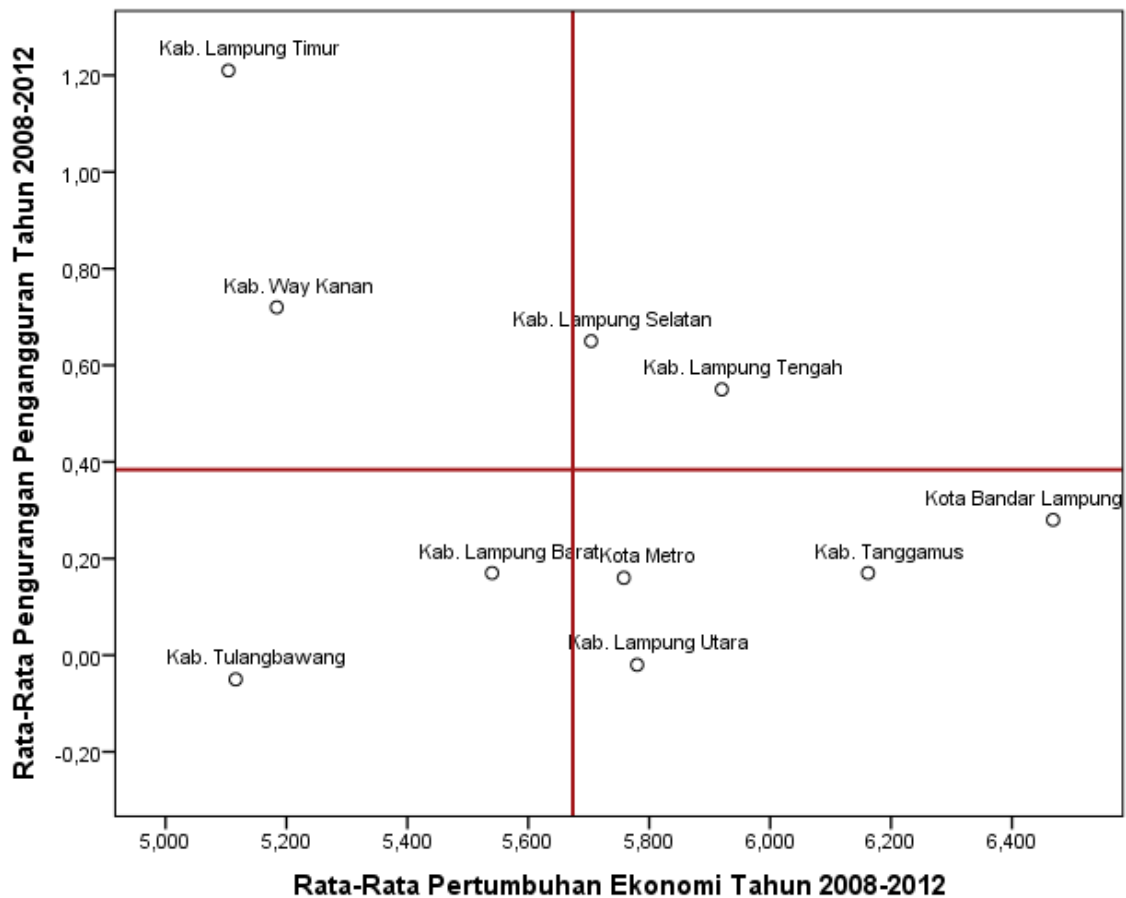
Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Way Kanan dan Lampung Timur yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

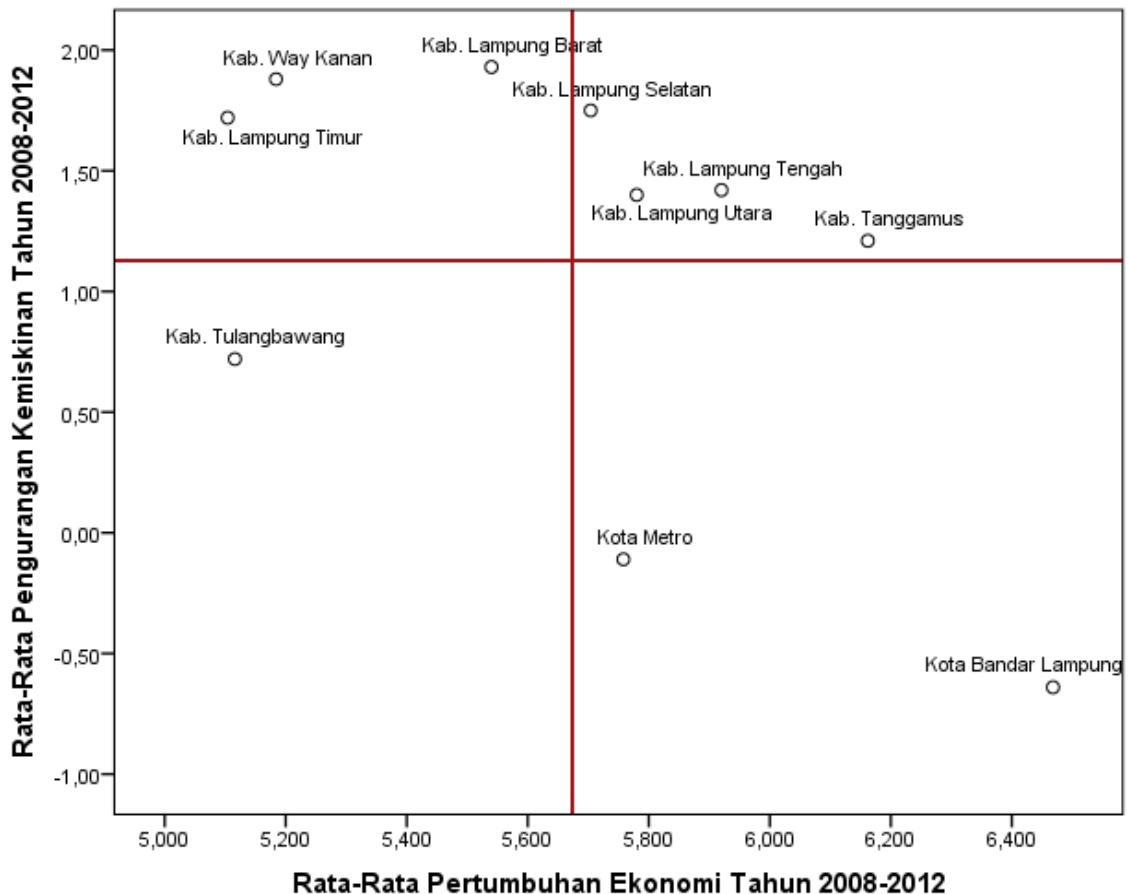
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008 -2013 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tanggamus termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Barat, dan Way Kanan terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan

dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Kota Metro dan Kota Bandar Lampung terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di

bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

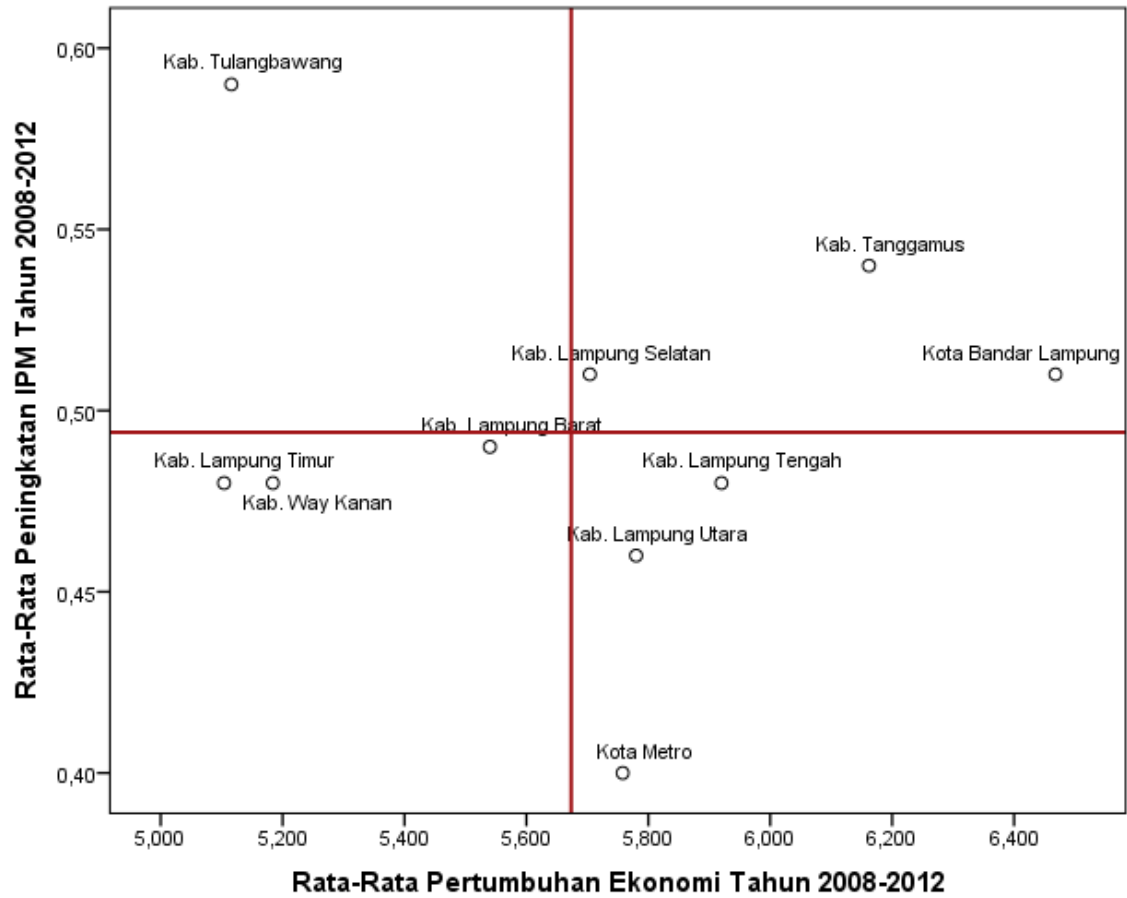
Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, dan Way Kanan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Kota Metro terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012

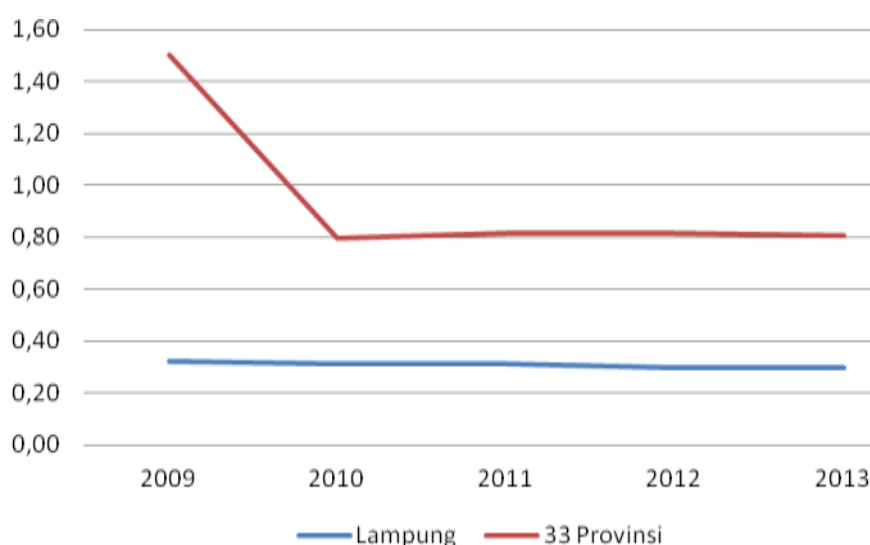


Sumber: BPS, 2012 (diolah)

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Lampung yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 tergolong rendah. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Sementara itu, kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Lampung juga cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kota dan kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki PDRB per kapita tinggi kemungkinan disebabkan karena berkembangnya sektor tersier dalam perekonomian, seperti sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memiliki PDRB perkapita tertinggi di antara kabupaten/ kota yang ada di wilayah ini. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan memadai sebagai ibukota provinsi turut mendukung tingginya pendapatan per kapita di daerah ini jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Dalam hal ini perlu adanya pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat pedesaan juga bisa menikmati pembangunan di Provinsi Lampung.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lampung Barat	4.659	5.497	6.146	6.720	7.983	9.181
Tanggamus	5.465	6.625	7.533	8.934	10.276	11.828
Lampung Selatan	7.222	8.460	9.879	11.150	12.611	14.819
Lampung Timur	7.683	8.702	9.477	10.943	12.310	13.817
Lampung Tengah	8.073	9.648	11.750	14.170	16.356	18.734
Lampung Utara	8.515	9.694	11.401	13.903	17.599	21.207
Way Kanan	4.846	5.531	6.324	7.394	8.525	9.517
Tulang Bawang	9.984	12.609	12.113	14.211	16.163	18.826
Pesawaran	-	8.592	10.449	12.604	14.629	16.740

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pringsewu	-	-	-	8.147	9327	10.559
Mesuji	-	-	-	15.653	16.985	19.306
Tulang Bawang Barat	-	-	-	12.797	15.632	18.279
Kota Bandar Lampung	12.487	15.921	19.630	21.944	25.031	28.279
Kota Metro	5.496	6.220	7.160	7.970	8.976	10.075
Lampung	8.200	9.912	11.616	14.193	16.631	18.612

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian

Struktur perekonomian Lampung tahun 2013 didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi Lampung dengan kontribusi sebesar 35 persen (Tabel 2). Selain pertanian perekonomian di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan angkutan. Peran sektor yang mendukung industrialisasi hanya berkontribusi di bawah 1 persen dalam perekonomian.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	35,54	26,61
2.	Pertambangan	2,04	2,02
3.	Industri Pengolahan	15,52	13,22
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,56	0,42
5.	Konstruksi	3,16	4,65
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	15,94	15,46
7.	Angkutan, Telekomunikasi	11,76	8,42
8.	Keuangan	6,22	11,06
9.	Jasa-jasa	9,27	8,14
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Semakin meningkatnya sektor perdagangan didukung oleh posisi geografis Provinsi Lampung dalam jalur perdagangan antara wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara itu, sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah sektor industri pengolahan. Jarak dengan Banten dan Jakarta sebagai pusat industri nasional relatif dekat dan seharusnya memberi keuntungan bagi pengembangan industri di Lampung, namun aglomerasi wilayah industri belum memberi dampak nyata bagi pengembangan industri sebagai penggerak pertumbuhan daerah Lampung. Sub sektor yang berkembang di Lampung adalah industri pengolahan makanan dan minuman.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Lampung 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,04	2,98	2,94	2,98	2,98
a. Tanaman Bahan Makanan	2,94	2,79	2,81	2,93	2,92
b. Tanaman Perkebunan	4,72	4,88	4,71	4,54	4,51
c. Peternakan	2,53	2,66	2,60	2,82	2,88
d. Kehutanan	0,56	0,55	0,55	0,54	0,57
e. Perikanan	3,01	2,89	2,74	2,63	2,55
2. Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,25	0,23	0,26	0,26
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,29	0,25	0,24	0,25	0,26
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
c. Penggalian	1,07	0,95	0,90	1,03	0,96
3. Industri Pengolahan	0,50	0,51	0,52	0,52	0,51
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,55	0,56	0,57	0,56	0,55
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,51	0,45	0,48	0,50	0,52
a. Listrik	0,64	0,62	0,65	0,66	0,68
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,67	0,59	0,61	0,67	0,67
5. Konstruksi	0,78	0,76	0,74	0,75	0,74
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,90	0,95	0,92	0,89	0,87
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,99	1,06	1,01	0,96	0,93
b. Hotel	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
c. Restoran	0,55	0,58	0,62	0,66	0,69
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,79	0,76	0,78	0,79	0,82
a. Pengangkutan	1,31	1,33	1,42	1,46	1,52
1). Angkutan Rel	8,63	7,43	8,19	9,21	10,50
2). Angkutan Jalan Raya	1,96	2,07	2,24	2,28	2,33
3). Angkutan Laut	0,94	0,83	0,86	0,94	1,05
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	2,73	3,13	3,58	3,72	3,53
5). Angkutan Udara	0,11	0,13	0,14	0,17	0,18
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,66	0,60	0,69	0,78	0,90
b. Komunikasi	0,37	0,36	0,36	0,38	0,41
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,82	0,87	1,05	1,06	1,11
a. Bank	0,96	1,05	1,47	1,48	1,57
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,49	0,48	0,53	0,58	0,63
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	1,18	1,26	1,27	1,28	1,30
e. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
9. Jasa-jasa	0,81	0,80	0,80	0,81	0,84

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Pemerintahan Umum	1,43	1,39	1,36	1,36	1,44
b. Swasta	0,34	0,36	0,39	0,42	0,44
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,65	0,72	0,83	0,96	1,05
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,15	0,15	0,16	0,19	0,20
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24

LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Apabila dilihat dari sektor yang menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan (*tradeable sector*), sektor pertanian merupakan sektor basis daerah (Tabel 3). Nilai *location quotient* subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi Lampung secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain, Provinsi Lampung memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Kecenderungan menarik adalah semakin menguatnya nilai LQ pada industri makanan dan minuman yang mengindikasikan peluang dan potensi Provinsi Lampung untuk mengembangkan industri makanan dan minuman. Oleh sebab itu, Provinsi Lampung perlu mengembangkan subsektor-subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014, sektor perekonomian yang menciptakan lapangan kerja secara signifikan adalah perdagangan, jasa-jasa, dan keuangan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di jasa-jasa dan keuangan yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	2.043.136	1.855.317	(187.819)
2	Pertambangan	11.251	42.712	31.461
3	Industri Pengolahan	283.653	313.816	30.163
4	Listrik, Gas, Air	3.138	3.221	83
5	Bangunan	118.334	136.594	18.260
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	556.983	756.136	199.153
7	Angkutan & Telekomunikasi	138.598	134.420	(4.178)
8	Keuangan	23.298	63.515	40.217
9	Jasa-Jasa	351.779	518.502	166.723
	Total	3.530.170	3.824.233	294.063

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi penggunaan, pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah selama tahun 2013 adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor (Tabel 5). Pada tahun 2009, ekspor sempat mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) cukup tajam terkait dengan krisis ekonomi dunia yang diiringi pelemahan permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Pada tahun-tahun sebelumnya peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan.

Dengan menyusutnya volume ekspor, pertumbuhan daerah untuk selanjutnya lebih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ada dua hal yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Pertama, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Kedua, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	52,24	56,92
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,97	1,17
3.	Konsumsi Pemerintah	10,76	11,93
4.	PMTB	17,63	16,95
5.	Perubahan Stok	0,37	-4,19
6.	Ekspor	42,28	65,16
7.	Impor	24,25	47,94
		100.0	100.0

Sumber : BPS, 2013

Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (PMTB) dalam perekonomian daerah.

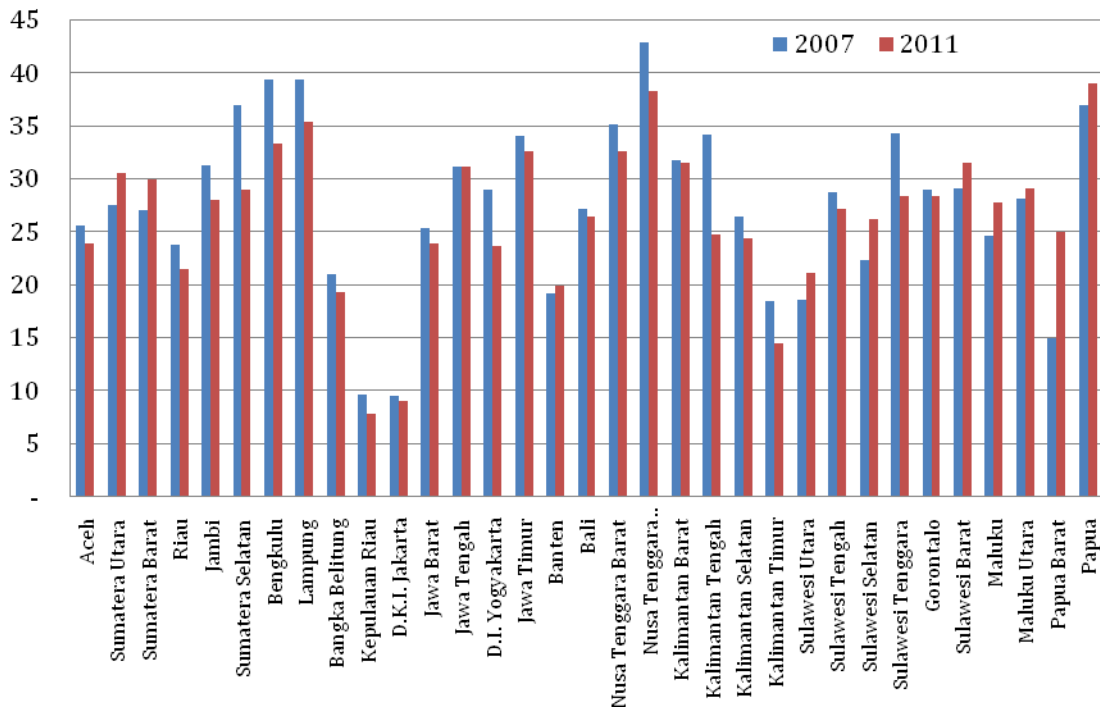
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Lampung secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Kualitas Pekerjaan Yang Tersedia Masih Rendah

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Meskipun porsi nya menurun dari tahun 2007 ke 2011, namun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Lampung termasuk yang tinggi secara nasional (Gambar 9). Status pekerjaan kurang berkualitas adalah pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah. Mereka cenderung bersedia bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup.

Di samping itu, penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008 terkait dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas. Gejolak pasar dunia tentu saja berdampak terhadap ekspor komoditas andalan ekspor Lampung seperti kopi, kakao, sawit, dan karet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Lampung belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber : BPS, 2011

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Lampung yang sangat strategis bagi pengembangan wilayah Sumatera dan Jawa mutlak membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Ketersediaan jaringan jalan di Lampung sesungguhnya cukup baik diukur dari kepadatan jalan (panjang jalan per kilometer persegi) lebih baik dari rata-rata nasional (Tabel 6).

Tabel 6
Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

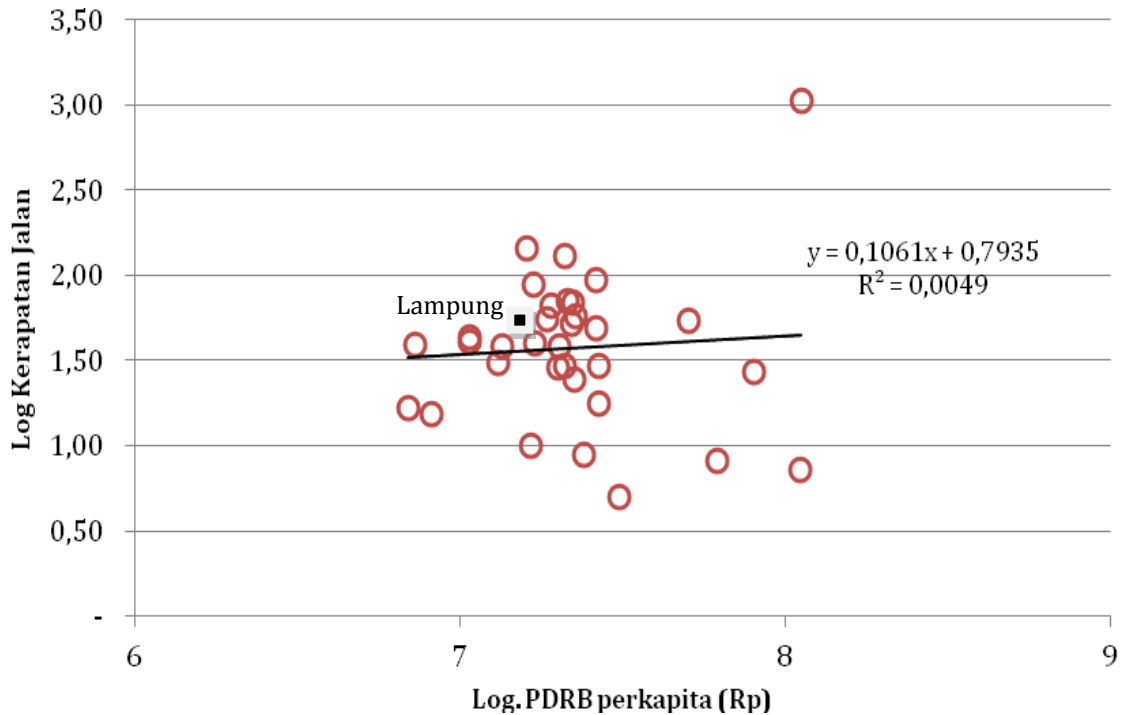
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
Indonesia		33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Tingkat kerapatan jalan di Lampung juga masih lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan 33 provinsi di Indonesia, posisi Lampung menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Provinsi yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu wilayah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi Lampung berada di atas kurva linier, menunjukkan secara kuantitas kerapatan jalan di Lampung di atas rata-rata tingkat kerapatan jalan provinsi lain di Indonesia.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dari segi kualitas, terlihat bahwa hampir 40 persen panjang jalan di Lampung masih belum beraspal. Kondisi ini tentu mengurangi daya dukung jalan bagi pergerakan barang. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan 2012

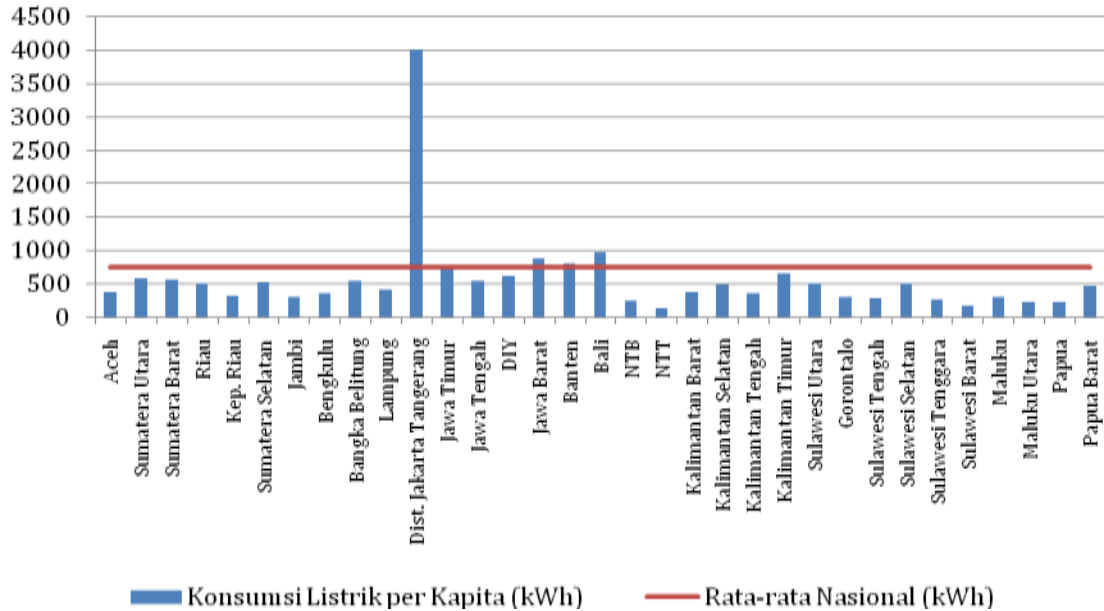
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Lampung	7.549	51	2.926	20	4.139	28	289	2	14.903	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Lampung berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 11). Pada hubungan antara tingkat

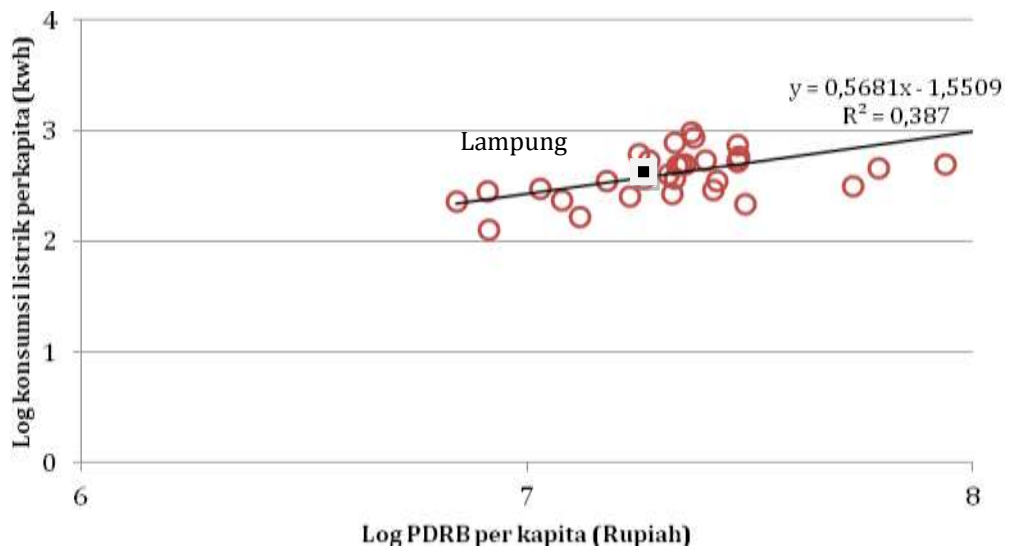
pendapatan dan konsumsi listrik, posisi Lampung berada di bawah kurva linier, menunjukkan Provinsi Lampung mengalami defisiensi infrastruktur listrik (Gambar 12).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



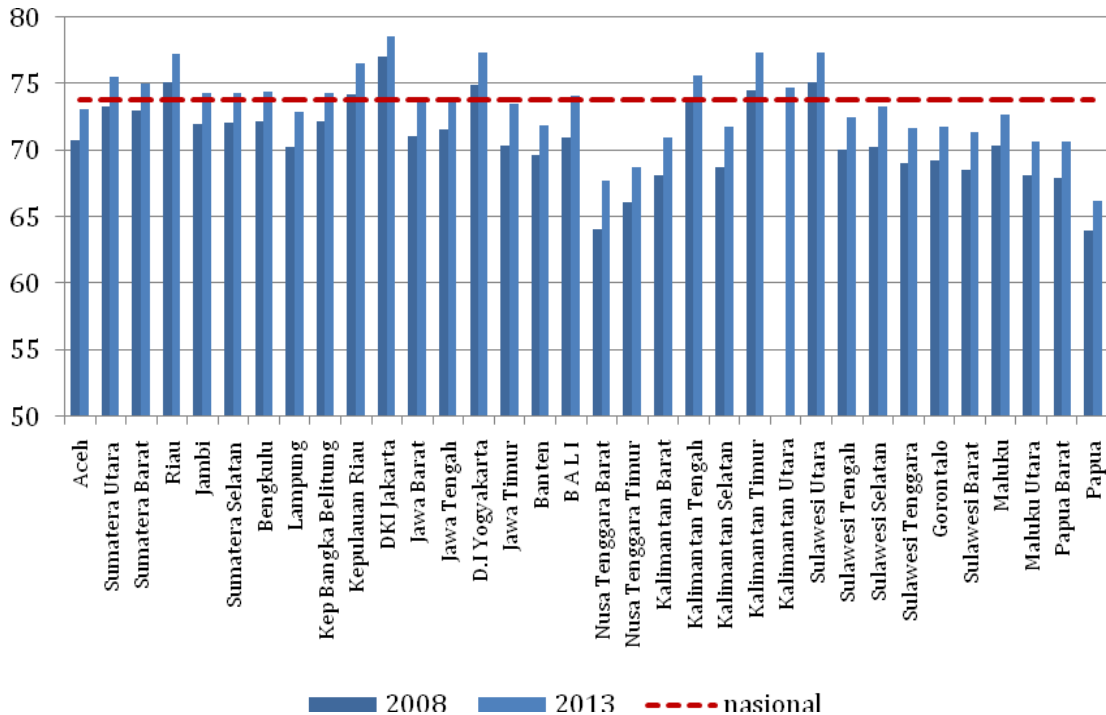
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan

semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Indeks Pembangunan Manusia Lampung pada tahun 2013 masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 21 nasional (Gambar 13). IPM Lampung sejak tahun tahun 2013 sebesar 72,87, di bawah rata-rata nasional yang sebesar 73,81. Ketertinggalan Lampung terutama adalah pada indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Lampung telah meningkat dari 7,3 tahun pada 2008 menjadi 7,89 tahun pada 2013. Angka melek huruf di Lampung pada tahun 2008 sebesar 93,63 persen dan meningkat menjadi 95,92 persen pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup terjadi perbaikan dari 69 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,09 tahun pada tahun 2013.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Lampung dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 24,22 persen pada tahun 2008 menjadi 31,70 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan Lampung belum mengalami perbaikan kualitas tenaga kerja karena rendahnya pendidikan angkatan kerja.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	1.948.296	1.837.681	(110.615)
2	SMTP	755.999	914.031	158.032
3	SMTA Umum	681.944	950.569	268.625
4	Diploma I/II/III/Akademi	91.010	84.826	(6.184)
5	Universitas	91.521	241.949	150.428
Total		3.568.770	4.029.056	460.286

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Lampung ternyata lebih rendah dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR pada tahun 2013 nilainya lebih besar dari satu (Tabel 9) Hal ini berarti bahwa kegiatan investasi di Provinsi Lampung ditentukan oleh suntikan dana dari luar. Dengan kata lain, pembangunan di Lampung dibiayai oleh tabungan masyarakat luar daerah.

Tabel 9
Posisi Simpanan dan Pinjaman Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Lampung	28.678	51.472	1,79	1,01
Sumatera	383.923	469.129	1,22	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

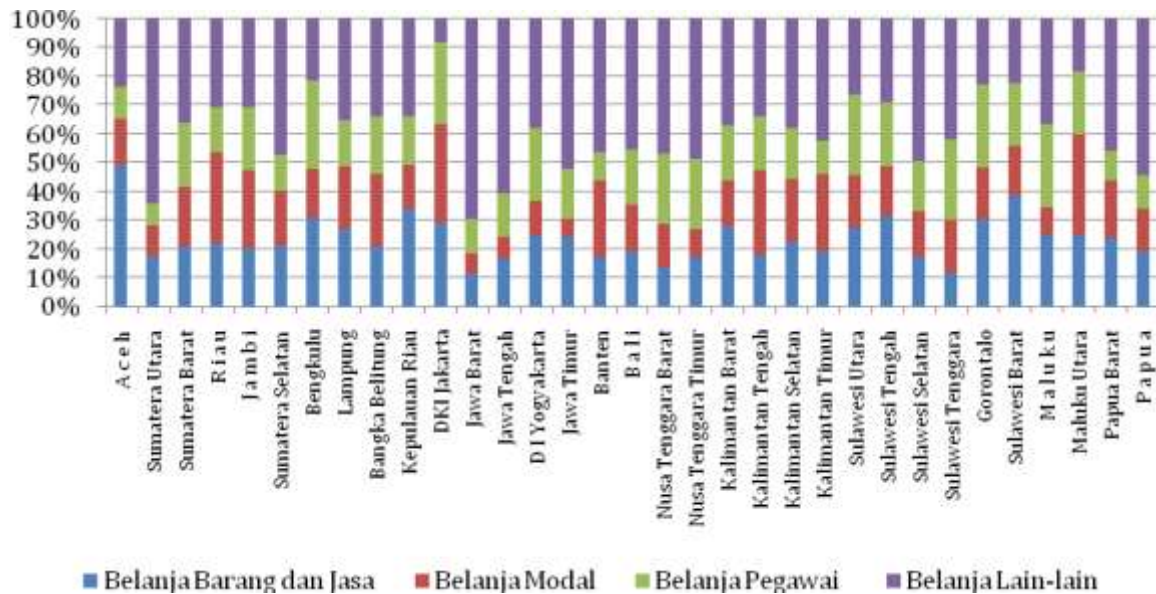
Sumber: BPS, 2013

Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus dihadapi Provinsi Lampung adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Lampung hanya mencapai 21,99 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung besarnya 16 persen (Gambar 14).

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah pada umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output (*marginal product of capital*) yang lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan Provinsi Lampung, prospek pertumbuhan daerah di tahun 2015 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Lampung memiliki tiga modal berharga. *Pertama*, posisi geografis Lampung yang sangat strategis

dalam alur perdagangan wilayah Jawa dan Sumatera. Jarak Lampung relatif dekat dengan pusat pertumbuhan nasional Jakarta dan salah satu pusat pertumbuhan Sumatera, yaitu Palembang. Jarak yang relatif dekat ini memungkinkan terjadinya *spill-over effect* atau limpahan dari perkembangan industri dan investasi di kedua kutub pertumbuhan tersebut. Perkembangan Jakarta yang sudah sangat jenuh kemungkinan akan diikuti dengan relokasi industri padat karya ke daerah-daerah terdekat. Hal ini karena industri-industri berorientasi ekspor masih sangat bergantung pada pelabuhan Tanjung Priok sehingga daerah-daerah di sekitar Jakarta berpeluang untuk menangkap perpindahan industri tersebut.

Kedua, struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang banyak.

Ketiga, beberapa komoditas unggulan Lampung memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi seperti Kopi Lampung, wisata gajah, dan pada tingkat tertentu udang budidaya. Komoditas ini memiliki keterkaitan yang tinggi dengan citra daerah yang bersifat unik dan khas sehingga relatif sulit untuk ditiru atau diproduksi oleh daerah lain. Dengan keunggulan tersebut, Provinsi Lampung dapat mengembangkan produk-produk tersebut sebagai ikon dan penggerak perekonomian daerah yang didukung dengan pengemasan secara baik sesuai standar internasional.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Lampung dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,28 – 8,2 persen dapat tercapai. Pada tahun 2014 kinerja ekonomi Lampung mengalami perbaikan dan terus akan meningkat di tahun 2015. Investasi yang semakin membaik dan masih tingginya konsumsi rumah tangga menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja ekonomi Lampung. Sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan kinerja sektor pertanian serta produksi makanan dan minuman di Lampung untuk kebutuhan ekspor. Kinerja ekonomi Lampung tahun 2015 juga didukung investasi bangunan *double track* batu bara di lintas Sumatera Selatan – Lampung.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 14,1 – 10,5 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 14,86 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Lampung harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 4,81 poin persentase atau 0,8 poin persentase per tahun. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Lampung harus bekerja keras mengatasi kemiskinan agar target RPJMN 2015-2019 dapat tercapai.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Lampung akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Lampung

maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas ekspor kopi, udang, kakao, kelapa sawit, dan karet.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, serta memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

